

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

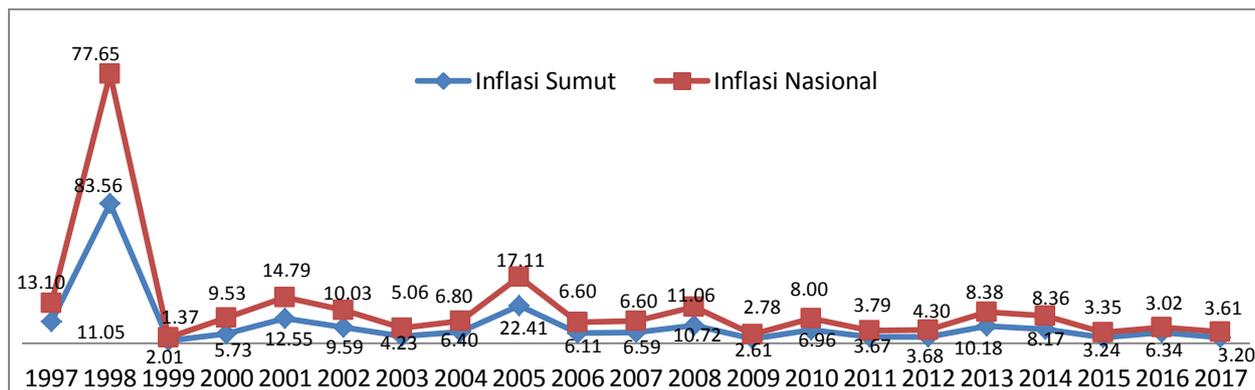
Salah satu indikator makro ekonomi guna melihat stabilitas perekonomian suatu negara adalah melalui inflasi, sebab perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi penting untuk dilakukan karena didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak inflasi sangat luas dan beraneka ragam serta menurunkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi merusak struktur ekonomi dan melemahkan kinerja ekonomi suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang melemah terutama yang berkenaan dengan sektor riil. Dampak inflasi tidak hanya pada bidang ekonomi tetapi juga sosial dan politik. (Pohan, 2008)

Inflasi yang terus berlanjut bahkan sampai melewati batas dua digit dapat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan alokasi faktor produksi nasional. Dampak inflasi terhadap pendapatan tidak merata. Para pemilik penghasilan tetap akan mengalami penurunan nilai riil dari pendapatnya sehingga menurunkan daya beli. Demikian juga pemegang uang tunai akan mengalami kerugian dengan adanya inflasi. Pemilik modal yang meminjamkan modalnya lebih rendah dari inflasi juga akan mengalami kerugian.

Inflasi mengakibatkan perubahan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah menjadi pajak bagi seorang dan menjadi subsidi bagi orang lain yang penghasilannya lebih rendah. Hal ini semakin terasa jika inflasi cukup tinggi (diatas 10%). Namun jika keadaan tersebut tidak segera diatasi dalam jangka panjang akan semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin sehingga dapat merusak perekonomian.

Inflasi memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian. akibat yang paling nyata adalah penurunan pendapatan riil yang diterima masyarakat. Pendapatan pekerja tidak selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan inflasi. Disamping itu inflasi perlu dihindari karena berakibat buruk terhadap kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan yang lambat dan peningkatan pengangguran. Inflasi yang serius akan mengurangi tabungan, mengurangi gairah perusahaan untuk melakukan investasi yang produktif, penurunan nilai mata uang dan defisit neraca pembayaran. Berbagai masalah ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran.

Laju inflasi di Sumatera Utara selama tahun 1997-2017 menunjukkan adanya fluktuasi yang bervariasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1997-2017

Grafik 1.1.Laju Inflasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1997-2017 (%)

Berdasarkan gambar grafik 1.1 pada periode awal 1998, tingkat inflasi tinggi sebesar 83,56%, lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 77,65%. Tingkat inflasi yang tinggi ini karena dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Selama tahun 1999-2000, tingkat inflasi Sumatera Utara mengalami penurunan dan penurunan yang tertinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 1,37%. Nilai tertinggi pada tahun 1998 merupakan dampak dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan faktor sosial politik yang tidak aman, sehingga mengakibatkan harga barang dan jasa terus meningkat tajam sampai akhir tahun 1998 (Laporan Perekonomian, 1998). Laju inflasi tahunan dari tahun 2000-2004 sudah mulai stabil dimana angkanya yang berada dibawah dua digit. Inflasi tahun 2000 jika dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 meningkat secara tajam yaitu dari 1,37% menjadi 5,73%.

Peningkatan laju inflasi ini diantaranya disebabkan adanya kenaikan tarif angkutan per 1 September 2000, kenaikan BBM per Oktober 2000, Bulan Puasa/Ramadhan (November 2000), Natal dan Lebaran (Desember 2000) (Laporan Perekonomian, 2000). Secara umum pada tahun 2001 dan tahun 2005, inflasi terus terjadi dengan nilai yang terbilang tinggi, yaitu dengan rata-rata

mencapai 10%. Pada tahun 2005 laju inflasi kembali naik mencapai 22,41%. Ini adalah inflasi tertinggi pasca krisis moneter (1997/1998). Penyesuaian terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menjadi faktor utama tingginya inflasi tahun 2005. Tingginya harga minyak di pasar internasional menyebabkan pemerintah berusaha untuk menghapuskan subsidi BBM. (Laporan Perekonomian, 2005)

Penurunan laju inflasi dikarenakan adanya penundaan kenaikan tarif dasar listrik oleh pemerintah (Laporan Perekonomian, 2007). Laju inflasi di tahun 2007 juga menunjukkan kondisi yang sama dengan tahun 2006 dimana nilainya masih di bawah 2,00%. Menjelang akhir tahun 2007, inflasi mengalami kenaikan yaitu dari 6,60%. Inflasi tahun 2008 mencapai 10,72% naik sebesar 4,12% bila dibandingkan dengan tahun 2007. Pada Januari tahun 2008 laju inflasi sebesar 1,14%. Inflasi pada tahun 2008 selain dipengaruhi oleh krisis keuangan global, juga dipengaruhi oleh inflasi harga yang diatur pemerintah dan bahan makanan yang bergejolak. Laju inflasi tahun 2009-2010 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dimana pada tahun 2009 inflasi sebesar 2,69% dan tahun 2010 sebesar 7,65%. Inflasi tahun 2016 tersebut melampaui target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di awal tahun yaitu 6,34% dan juga melampaui target inflasi pemerintah sebesar 5,3%. Sedangkan tahun 2017 tingkat inflasi mengalami penurunan sebesar 3,20%.

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Berpijak dari sejumlah teori umum tentang inflasi seperti kaum Klasik, Keynes, Moneterisme, pandangan ekspektasi masyarakat, tentu kajian tentang inflasi menjadi sangat luas, dan memungkinkan untuk

dipandang dari berbagai sisi. Pandangan Klasik misalnya melihat bahwa faktor utama yang mempengaruhi inflasi adalah jumlah uang beredar dan kredit. Pandangan ini oleh Keynes kemudian dilengkapi, yakni dengan menambahkan beberapa variabel seperti pengeluaran pemerintah, suku bunga dan investasi. Teori inflasi Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat *full employment*. Menurut Keynes kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Jika uang beredar bertambah maka harga akan naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang untuk transaksi, dengan demikian akan menaikkan suku bunga. Hal ini akan mencegah pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi. (Ackley, 1983:543)

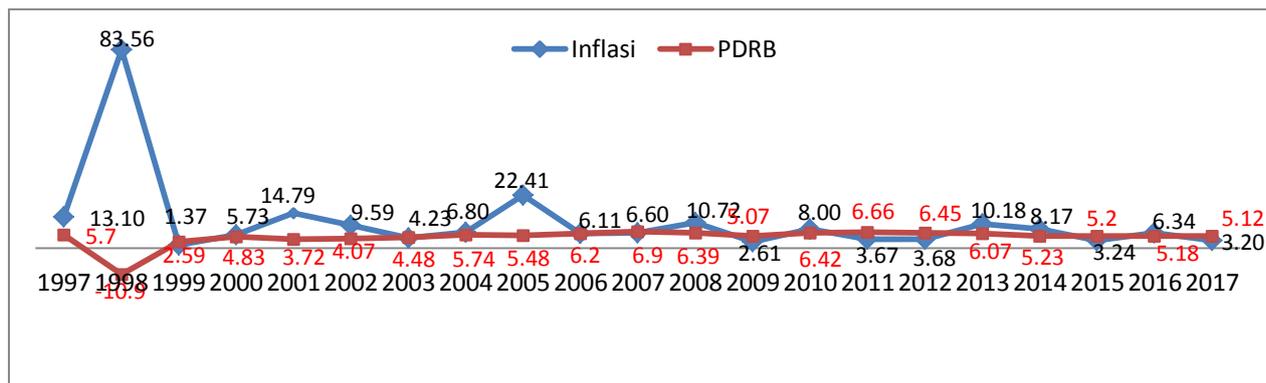
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, Solow, dan teori Endogen oleh Romer bahwa terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi. (Todaro, 2006:92).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan inflasi di Sumatera Utara yaitu pertumbuhan ekonomi. Menurut Teori Keynes menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimana di dalam jangka pendek (*short-run*) kurva penawaran agregat adalah positif. Hubungan yang selanjutnya secara hipotesisnya kepada hubungan jangka panjang (*long-run relationship*) antara inflasi

dan pertumbuhan ekonomi dimana inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun. (Mankiw, 2003).

Inflasi sebagai salah satu dinamika perekonomian adalah hal yang diprioritaskan oleh pemerintah sebab dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Ketika inflasi meningkat, maka harga-harga barang yang meningkat pula akan menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokoknya. Secara sederhananya, Inflasi yang dialami masyarakat ini dirasakan dalam jangka pendek dan memiliki efek langsung (Direct Effect).

Dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran (Sadono Sukirno, 2000). Berbanding terbalik dengan Inflasi, meski tingkat Pengangguran terjadi di lingkungan masyarakat tapi dampaknya tidaklah dirasakan langsung (Indirect Effect) oleh masyarakat secara keseluruhan melainkan hanya sebagian atau bahkan beberapa masyarakat yang mungkin saling terkait. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Kondisi pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal yang dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1997-2017

Grafik 1.2. Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1997– 2017 (dalam %)

Berdasarkan grafik 1.2. Tahun 1997-2017 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara cenderung menurun dan berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju pertumbuhannya atas harga konstan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 1997-2016 yaitu sebesar 4,76%. Perkembangan PDRB di Sumatera Utara pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar minus 10,9%. Pada saat tahun yang sama terjadi peningkatan inflasi 83,56%. Disebabkan karena dampak krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998. Perkembangan PDRB Sumatera Utara yang mengalami tren peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Pada saat terjadinya peningkatan PDRB tersebut dari 5,74% sampai 6,45%. Sedangkan inflasi yang stabil rendah dan terkendali yaitu 6,80% sampai 3,68%. Sudah menjadi tugas pemerintah bersama dengan Bank Indonesia berusaha mewujudkan target pertumbuhan PRDB yang tinggi namun dengan tetap mempertahankan tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil. Perkembangan PDRB pada tahun 2005 kisaran 5,48% dan 2008 kisaran 6,39%. Sedangkan inflasi mengalami penurunan dari 22,41% hingga 10,72%. Disebabkan terjadi peningkatan karena

meningkatnya *administered price* dari BBM yang memukul perekonomian. Pada tahun 2014 akhir, kembali inflasi terjadi peningkatan kisaran 8,17% sedangkan pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 5,23% akibat peningkatan harga *administered price* BBM yang mengalami peningkatan pada era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Data tersebut menunjukkan kesesuaian dengan teori yang ada.

Kebijakan fiskal terkait dengan semua instrument yang menyangkut penggunaan sumber daya anggaran negara (APBN) dalam ekonomi. Dalam jangka pendek kebijakan fiskal akan mempengaruhi sisi permintaan secara agregat, sedangkan dalam jangka panjang kebijakan fiskal akan mempengaruhi sisi penawaran. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan supply side (sisi penawaran) dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian melalui pendekatan permintaan agregat diterangkan melalui pendekatan Keynes. Pendekatan Keynesian mengasumsikan adanya *price rigidity* dan *excess capacity* sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat (demand driven). Keynes menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari pemerintah. (Nanga, 2005).

Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan pemotongan pajak, dengan begitu akan menstimulus pasar barang dan meningkatkan output nasional. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Kebijakan pemerintah

untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Dalam teori kedua Keynes kenaikan harga barang-barang disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat akibat adanya kenaikan biaya produksi dikarenakan adanya kenaikan dari faktor-faktor produksi itu sendiri hal ini adalah hubungan instrumen fiskal dengan inflasi yaitu *cost push inflation*. Penerimaan yang berhubungan positif terhadap inflasi sesuai dengan teori tersebut.

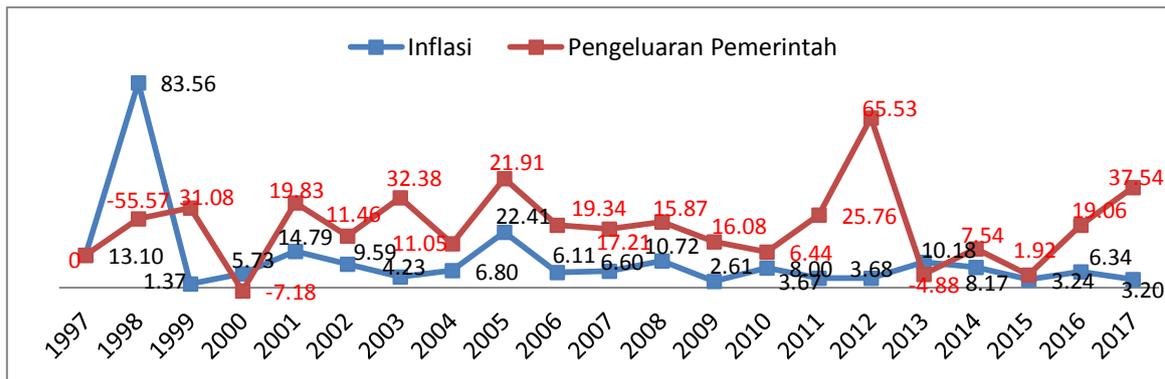
Kebijakan fiskal kontraktif dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tarif pajak. Seperti tarif pajak untuk impor barang modal dan bahan baku, pajak penghasilan dan lainnya untuk mendorong peningkatan biaya produksi. Pada akhirnya terjadi kenaikan inflasi (*demand pull inflation*) karena perusahaan meningkatkan harga output untuk memperoleh laba maksimal. Diakibatkan karena kenaikan biaya produksi mempengaruhi harga faktor produksi sehingga berdampak pada kinerja perusahaan dengan menaikkan harga output atau mengurangi output produksi yang akhirnya juga menaikkan harga (Mankiw, 2003). Salah satu kebijakan fiskal adalah kenaikan tarif pajak tinggi yang sangat membebani kegiatan produksi, akibatnya perusahaan barang dan jasa mengurangi hasil output produksinya. Hal ini menciptakan dasar terjadinya inflasi yaitu menurunnya penawaran sedangkan permintaan tetap.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar

terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Besar kecilnya peranan pemerintah dalam sebuah perekonomian dapat dilihat dari besar kecilnya proporsi pengeluaran pemerintah terhadap total kegiatan perekonomian atau pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Propinsi Sumatera Utara adalah propinsi yang paling padat penduduknya di luar pulau Jawa dan perekonomiannya termasuk yang terbesar di Indonesia. Perekonomian Sumatera Utara terbuka dan mempunyai hubungan perdagangan yang luas, baik dengan pasaran dunia, maupun dengan pusat-pusat perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu propinsi yang mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan propinsi lain. Memiliki sumber daya alam yang relatif cukup besar dengan kondisi geografis yang spesifik.

Propinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten / Kota yang dengan memiliki realisasi pengeluaran pemerintah yang cukup besar, seperti yang terlihat pada grafik 1.3 Pengeluaran Pemerintah Propinsi Sumatera Utara terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1997-2017

Grafik 1.3. Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1997– 2017 (dalam %)

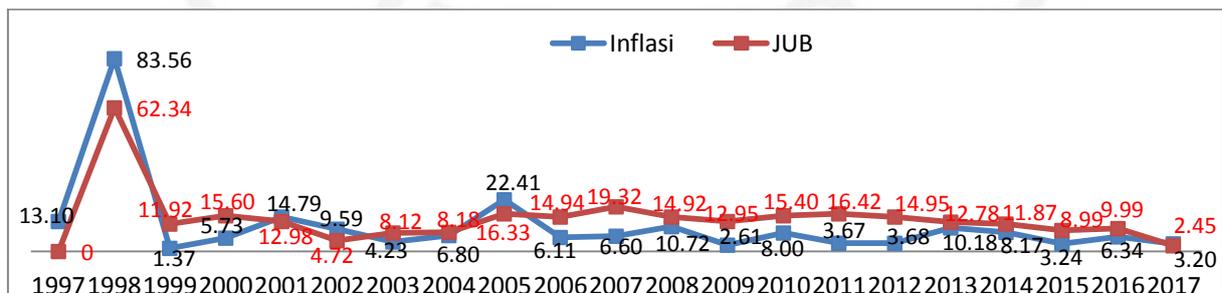
Berdasarkan grafik 1.3. Laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara selama tahun 1997-2017 menunjukkan adanya fluktuasi yang bervariasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor yang berbeda. Dari Grafik di atas, trend yang terlihat adalah kenaikan pengeluaran pemerintah cenderung meningkatkan inflasi. Pengeluaran pemerintah daerah yang terendah pada tahun 1998 sebesar minus 55,57% dari tahun sebelumnya, disebabkan ada pasca pemulihan krisis ekonomi global. Pengeluaran pemerintah daerah tertinggi pada tahun 2012 sebesar 65,53%. Pengeluaran pemerintah Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang negatif dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1998 dan tahun 2008. Hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi. Perkembangan pengeluaran pemerintah daerah tahun 2008-2012 mengalami peningkatan sebesar 15,87% sampai 65,53%. Sedangkan pada tahun yang sama inflasi mengalami penurunan yang stabil dari 10,72% hingga 3,68%. Penyebab peningkatan pengeluaran pemerintah daerah, salah satunya kenaikan harga minyak mentah dunia. Perkembangan pengeluaran pemerintah daerah tahun 2012-2017 mengalami peningkatan. Sedangkan inflasi mengalami penurunan sebesar 3,68% sampai

3,20%. Kenaikan pengeluaran pemerintah cenderung meningkatkan inflasi. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah daerah dengan inflasi.

Sementara kebanyakan ekonom lainnya, percaya bahwa pada hampir semua kasus inflasi, penyebab utamanya adalah pertumbuhan uang. Menurut Mankiw (2003:82), keeratan hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar tidak dapat dilihat dalam jangka pendek, melainkan pada jangka panjang. Contohnya di Indonesia, hanya dalam waktu 9 bulan saat krisis 1997 melanda, pertumbuhan uang beredar melesat hingga 115% (Siregar & Rajaguru, 2005) dan menjadi penyebab utama meningkatnya inflasi tahun 1998 yang mencapai 76,6%. Hasil studi Siregar & Rajaguru (2005) mendukung aliran monetaris seperti Harriss (1975) dan Moroney (2002) bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, inflasi adalah fenomena moneter akibat dari pertumbuhan uang.

Berdasarkan Teori Kuantitas, fluktuasi yang terjadi pada harga disebabkan oleh naik turunnya volume uang yang beredar (JUB) dalam perekonomian. Irving Fisher menyatakan bahwa, “pada hakikatnya perubahan dalam jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya atas harga”, yang berarti peningkatan persentase jumlah uang beredar akan sama dengan peningkatan persentase tingkat inflasi (Mankiw, 2003). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif terhadap inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat harga yang dapat diprediksikan oleh perekonomian, dan dalam jangka panjang hal tersebut dapat berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi karena tingginya laju inflasi.

Pertumbuhan jumlah uang beredar (JUB) yang terjadi secara wajar akan memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi dan pasar saham secara jangka pendek, namun pertumbuhan yang drastis akan memicu inflasi yang tentunya memberikan pengaruh negatif. Teori kuantitas uang adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, dimana menyoroti peranan penambahan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga. Artinya bahwa, Pertama Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar. Kedua, Dengan bertambahnya uang beredar secara terus menerus, masyarakat akan merasa kaya sehingga akan menaikkan konsumsinya, dan keadaan ini akan menaikkan harga. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang. Ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara jumlah uang beredar dan laju inflasi. Grafik di bawah ini menjelaskan perkembangan jumlah uang beredar selama tahun 1997-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1997-2017

Grafik 1.4. Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Tahun 1997– 2017 (dalam %)

Berdasarkan Grafik 1.4 menunjukkan bahwa Tahun 1997-2017 pertumbuhan jumlah uang beredar berfluktuatif. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2007, dimana jumlah uang beredar (M2) tahun 2007 mencapai

Rp. 1.649.662 miliar mengalami peningkatan sebesar 19,33% dari tahun 2006 dengan jumlah uang beredar (M2) hanya sebesar Rp 1.382.493 miliar atau kisaran 14,94%. Sedangkan inflasi mengalami penurunan 6,60% menjadi 6,11%. Perkembangan jumlah uang beredar di Sumatera Utara yang terus meningkat ini dipengaruhi oleh akselerasi penyaluran kredit perbankan yang tumbuh lebih tinggi. Hal ini memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ke depan. Akselerasi pertumbuhan kredit yang meningkat terutama terjadi pada pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) (www.bi.go.id).

Kenyataan diatas menunjukkan hubungan positif jumlah uang beredar (M2) dengan inflasi. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa, jika perputaran uang adalah tetap, maka kuantitas uang menentukan nilai dari output perekonomian. Dengan kata lain, perubahan output nominal yang dicerminkan dalam tingkat harga cukup banyak dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Lebih jauh dapat diartikan bahwa perubahan tingkat inflasi di Sumatera Utara sebagai akibat perubahan harga dalam periode tersebut cukup banyak dipengaruhi oleh jumlah uang beredar.

Inflasi yang terjadi di suatu negara dapat menurunkan nilai mata uangnya. Kenaikan harga-harga (inflasi) menyebabkan penduduk negara tersebut semakin banyak mengimpor dari negara lain, sehingga permintaan akan valuta asing bertambah. Di lain pihak, ekspor negara tersebut bertambah mahal dan ini akan mengurangi permintaannya, sehingga akan menurunkan penawaran valuta asing (Sukirno, 2002:295).

Tingkat inflasi yang tinggi dapat melemahkan nilai tukar mata uang suatu negara. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi dapat memicu bertambahnya nilai

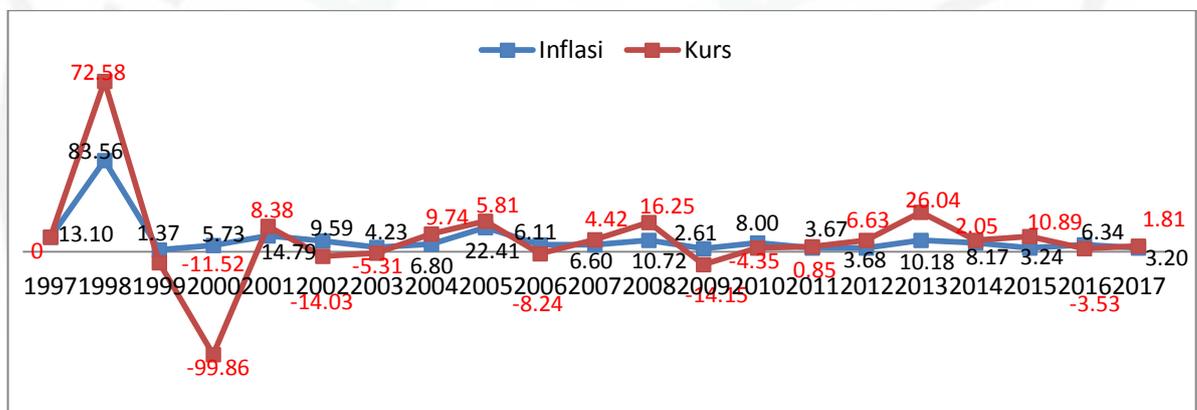
impor. Menurut Madura (2006:299) dalam Puspitaningrum (2014:3), perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Jika inflasi suatu negara meningkat, permintaan atas mata uang negara tersebut menurun, dikarenakan ekspornya juga turun (disebabkan harga yang lebih tinggi).

Menurut Charles, et al dalam Oktavia, dkk (2013:154), hubungan inflasi dengan nilai tukar adalah positif. Berdasarkan pendekatan *Purchasing Power Parity* bila terjadi peningkatan inflasi, maka untuk mempertahankan keseimbangan *Law of One Price*, nilai tukar harus terdepresiasi. Teori *Purchasing Power Parity* juga mengatakan bahwa negara yang mata uangnya mengalami tingkat inflasi yang tinggi seharusnya mengurangi nilai mata uangnya relatif terhadap mata uang dengan tingkat inflasi yang lebih rendah.

Selain itu inflasi juga terjadi karena tekanan dari luar yaitu depresiasi nilai rupiah dan juga karena harga barang luar negeri (*Imported Inflation*). Perilaku harga cenderung mudah meningkat karena pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah dimana harga cenderung sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat. Ketika mata uang suatu negara terapresiasi (nilainya naik secara relatif terhadap mata uang lainnya), barang yang di hasilkan oleh negara tersebut di luar negeri menjadi mahal dan barang-barang luar negeri di negara tersebut menjadi lebih murah (asumsi harga domestik konstan di kedua negara). Sebaliknya, ketika mata uang suatu negara terdepresiasi, barang-barang negara tersebut yang di luar negeri menjadi lebih murah dan barang-barang luar negeri di negara tersebut menjadi lebih mahal (Mishkin, 2009).

Depresiasi nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain akan mengakibatkan meningkatnya biaya untuk mengimpor barang seperti barang

konsumsi, barang modal dan bahan baku untuk di gunakan dalam keperluan proses produksi. Untuk menutupi biaya impor yang menjadi mahal produsen dalam negeri akan menaikkan harga barang produksinya sehingga akan mengakibatkan kenaikan harga pada tingkat harga domestik yang merupakan cerminan dari laju inflasi. Ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara nilai tukar dan laju inflasi. Grafik di bawah ini menjelaskan nilai tukar rupiah terhadap dollar di Sumatera Utara selama tahun 1997-2017.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1997-2017

Grafik 1.5. Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Nilai Tukar di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1997-2017 (dalam %).

Secara keseluruhan hubungan antara perubahan nilai tukar dan tingkat inflasi sebelum dan sesudah tahun 1997 tampaknya mengalami pergeseran. Berdasarkan Grafik 1.6 pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tahun 1997-2016 menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada grafik di atas bisa dilihat setelah krisis moneter 1997, nilai tukar bergerak lebih fluktuatif, dengan trend yang tampaknya berhubungan negatif dengan inflasi. Pada tahun 2001 nilai tukar rupiah sebesar 10.400 per US\$. Data menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir (2013-2016) rupiah terus melemah. Nilai tukar rupiah ini merupakan yang terparah dari tahun-tahun

sebelumnya. Pada tahun 2016 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat mencapai Rp 13.307/US\$. Melemahnya rupiah dalam tiga tahun terakhir disebabkan oleh faktor global dan regional serta domestik sendiri yang mengganggu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Faktor pertama, global dan regional, yaitu ditetapkan kebijakan moneter di Amerika Serikat yang berpengaruh kepada semua negara berkembang, *emerging market* termasuk ke Indonesia. Kemudian dari dalam sendiri defisit yang besar di neraca pembayaran mengakibatkan terganggunya fundamental ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian, fenomena inflasi di Sumatera Utara menarik untuk diteliti. Studi empiris dan fenomena data yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan pentingnya mengembangkan penelitian inflasi di Sumatera Utara. Dengan mengembangkan penelitian-penelitian yang telah lalu, penulis menyimpulkan bahwa peranan dan faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi inflasi di Sumatera Utara masih penting untuk membangun keadaan yang kondusif dalam bidang moneter suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah kajian tentang inflasi di provinsi Sumatera Utara yang penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Determinan Inflasi di Provinsi Sumatera Utara: Pendekatan *Error Correction Model (ECM)*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Uang Beredar (JUB), Nilai Tukar (Kurs), Terhadap Inflasi Provinsi Sumatera Utara Baik Jangka Pendek Dan Jangka Panjang.

1.3. Tujuan Penelitian

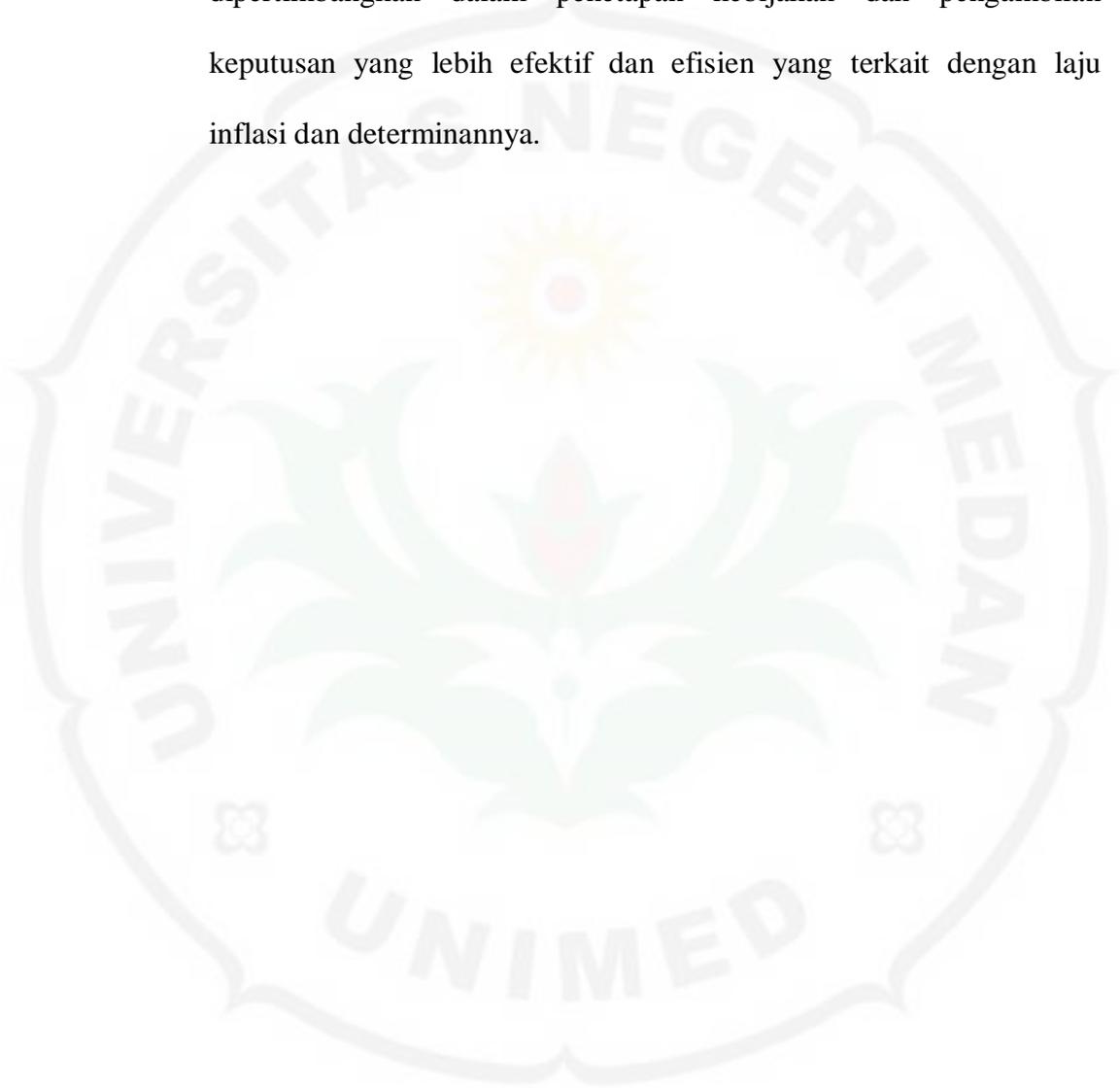
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Uang Beredar (JUB), Nilai Tukar (Kurs), Terhadap Inflasi Provinsi Sumatera Utara Baik Jangka Pendek Dan Jangka Panjang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi yang berkaitan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Sumatera Utara.
 - b. Penelitian diharapkan bagi civitas akademika dapat menambah informasi atau sumbangan pemikiran dan bahan kajian penelitian
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.
 - b. Dengan menganalisis pengaruh masing-masing faktor yang diteliti dapat dipakai sebagai informasi bagi pemerintah, hasil yang diperoleh

mungkin bisa dipakai sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien yang terkait dengan laju inflasi dan determinannya.



THE
Character Building
UNIVERSITY